

Strategi Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan yang Transparan di SD Negeri 136 Kota Palembang

Dian Agustina¹, Arwan², Ade Akhmad Saputra³

^{1, 2, 3} UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia
Surat-e: dianagustinapsht@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze transparent financial management strategies at SD Negeri 136 in Palembang, examine the application of transparency principles in the management of school funds, and identify the factors that support and hinder the achievement of effective, accountable, and transparent financial management. School financial management is a crucial aspect in supporting educational quality as it relates to the planning, implementation, monitoring, and accountability of educational fund usage. Issues that still frequently arise in educational financial management include weak transparency, limited human resources, and suboptimal utilization of information technology within the school's financial administration system. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Data analysis involves the stages of data collection, data condensation, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of the study indicate that financial management at SD Negeri 136 in Palembang has been carried out systematically through the preparation of the RKAS, budget implementation in accordance with procedures, internal and external oversight, and transparent financial reporting to relevant parties. The school has also utilized digital technology through the ARKAS application to support the effectiveness and accuracy of financial administration. Transparency in financial management is achieved through open financial reporting, the involvement of school committees, and regular evaluations of budget utilization. However, several obstacles remain, such as internet connectivity issues and technical limitations in the online reporting system. This study concludes that transparent financial management strategies can enhance accountability, the effective use of funds, and public trust in educational institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan yang transparan di SD Negeri 136 Kota Palembang, mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan keuangan sekolah menjadi aspek penting dalam mendukung mutu pendidikan karena berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan. Permasalahan yang masih sering terjadi dalam pengelolaan keuangan pendidikan adalah lemahnya transparansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi keuangan sekolah.

KEYWORDS

transparency, financial management, elementary schools, accountability, ARKAS, BOS funds.

KATA KUNCI

transparansi, pengelolaan keuangan, sekolah dasar, akuntabilitas, ARKAS, dana BOS.

How to Cite:

“Agustina, D., Arwan, & Saputra, A. A. (2026). Strategi Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan yang Transparan di SD Negeri 136 Kota Palembang. *Elementary Pedagogy*, 2(2), 81–102.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan RKAS, pelaksanaan anggaran sesuai prosedur, pengawasan internal dan eksternal, serta pelaporan keuangan yang terbuka kepada pihak terkait. Sekolah juga telah memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi ARKAS untuk mendukung efektivitas dan akurasi administrasi keuangan. Transparansi pengelolaan keuangan diwujudkan melalui keterbukaan laporan keuangan, pelibatan komite sekolah, serta evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan, seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan teknis dalam sistem pelaporan daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang transparan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas penggunaan dana, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Keuangan yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya berfokus pada penggunaan dana, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengolahan keuangan yang efektif dan transparan agar pengelolaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Permasalahan pengelolaan keuangan pendidikan hingga saat ini masih menjadi isu yang sering ditemukan di berbagai lembaga pendidikan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023, sektor pendidikan masih termasuk salah satu sektor yang rawan terjadi penyimpangan anggaran, khususnya pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada beberapa daerah menunjukkan masih adanya kelemahan administrasi, kurangnya keterbukaan laporan keuangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan masih perlu ditingkatkan agar dana pendidikan benar-benar digunakan secara optimal untuk mendukung mutu Pendidikan (Keuangan, 2023).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Menurut Selianawati (2025), transparansi adalah keterbukaan pemerintah atau organisasi dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam konteks pendidikan, transparansi keuangan berarti sekolah harus mampu menyajikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder. Transparansi yang baik

akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan serta meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, Selianawati (2025), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan meliputi serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atau pertanggungjawaban keuangan. Seluruh proses tersebut harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya diterapkan pada tahap pelaporan, tetapi mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan pendidikan. Selanjutnya, memaksa lembaga pendidikan untuk menerapkan strategi manajemen keuangan terbaik (R. Hidayat, 2022). Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana digunakan sehingga dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Permasalahan kurangnya transparansi keuangan di sekolah umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang manajemen keuangan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, beberapa sekolah masih belum melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam proses penyusunan maupun evaluasi anggaran. Akibatnya, informasi penggunaan dana sekolah kurang tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengolahan keuangan yang transparan melalui beberapa langkah, seperti penyusunan anggaran yang melibatkan stakeholder, penggunaan sistem administrasi berbasis digital, pelaporan keuangan secara berkala, serta pengawasan internal dan eksternal yang lebih optimal. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan dana sekolah sekaligus memperkuat prinsip *good governance* dalam pengelolaan pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan. Penelitian oleh Widyani (2025), menemukan bahwa transparansi laporan keuangan sekolah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan. Penelitian Nugraha (2025), menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam administrasi keuangan sekolah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Penelitian oleh Suyati (2025), menyatakan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Penelitian luar negeri juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan. Penelitian oleh Bush dan Coleman 2018 pada Nurkhasyanah (2025) di Inggris menemukan bahwa transparansi keuangan sekolah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Penelitian oleh Cheng (2020), di China menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan sekolah mampu meningkatkan kualitas administrasi dan pengawasan anggaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada transparansi laporan keuangan atau penggunaan teknologi dalam administrasi keuangan sekolah. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada strategi pengolahan keuangan lembaga pendidikan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi

keuangan secara transparan di SD Negeri 136 Kota Palembang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada kajian strategi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan prinsip transparansi dan partisipasi stakeholder dalam konteks sekolah dasar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengolahan keuangan lembaga pendidikan yang transparan di SD Negeri 136 Kota Palembang, mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Kerangka Teori

Teori Manajemen Keuangan Pendidikan

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen keuangan pendidikan. Menurut Mulyasa (2022), manajemen keuangan pendidikan merupakan seluruh proses pengelolaan dana pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan secara sistematis agar penggunaan anggaran dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Dalam konteks sekolah, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dana, tetapi juga mencakup penyusunan program sekolah melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penggunaan dana sesuai kebutuhan prioritas, pengawasan penggunaan anggaran, serta pelaporan keuangan secara akuntabel. Qomar (2016), menjelaskan bahwa manajemen keuangan pendidikan meliputi kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana, melakukan pengawasan, serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran kepada pihak terkait.

Teori ini relevan dengan penelitian di SD Negeri 136 Kota Palembang karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan pengelolaan keuangan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara sistematis. Penyusunan RKAS dilakukan bersama kepala sekolah, bendahara, dan guru sehingga penggunaan dana lebih terarah dan sesuai kebutuhan sekolah.

Transparansi

Penelitian ini juga menggunakan teori transparansi sebagai landasan dalam menganalisis keterbukaan pengelolaan keuangan sekolah. Transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses dan hasil pengelolaan sumber daya publik. Menurut Mardiasmo (2002) transparansi adalah keterbukaan pemerintah atau organisasi dalam memberikan informasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran secara jelas dan bertanggung jawab. Sementara itu, Purwanti (2022) menjelaskan bahwa indikator transparansi meliputi: Ketersediaan dokumen, Kejelasan informasi, Keterbukaan proses pengelolaan dan Regulasi yang menjamin keterbukaan informasi.

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan laporan dana BOS, penyampaian informasi penggunaan anggaran kepada komite sekolah, serta dokumentasi administrasi yang

dapat diakses pihak terkait. Transparansi menjadi penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan meminimalisasi penyalahgunaan anggaran.

Teori transparansi sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SD Negeri 136 Kota Palembang telah menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan dana melalui pelaporan berkala, dokumentasi keuangan yang lengkap, serta pelibatan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi pengelolaan keuangan yang transparan di lingkungan sekolah. Metode studi kasus digunakan untuk menggali kondisi nyata yang terjadi di SD Negeri 136 Kota Palembang secara kontekstual dan menyeluruh. Menurut Moleong (2013), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Maleong (2013), mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Menurut Creswell & Creswell (2017), menyatakan bahwa "*a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meaning meaning of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both*".

Desain penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi keuangan sekolah dilakukan. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji manajemen keuangan sekolah melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat dan memperdalam informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi. Jenis pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan nonpartisipan. Pengamatan nonpartisipan yaitu peneliti tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan yang diamati.

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis. Tahapan atau proses analisis data dilakukan sesuai dengan model atau siklus dari Ramadani (2025), yaitu meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk pengecekan keabsahan hasil penelitian, peneliti menggunakan triangulasi, pengecekan anggota, kecukupan bahan referensi, serta meningkatkan ketekunan. Tahap-tahap dalam penelitian ini meliputi: 1) tahap persiapan; 2) tahap pendahuluan; 3) tahap penyusunan proposal riset; 4) tahap pelaksanaan; dan 5) tahap penyusunan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Keuangan Pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang, ia menyampaikan bahwa penerapan manajemen keuangan pendidikan di sekolah telah dilaksanakan secara maksimal melalui pengelolaan dana yang tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, tenaga administrasi, serta komite sekolah agar seluruh penggunaan anggaran berjalan secara efektif dan akuntabel.

Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan:

“Penerapan manajemen keuangan selalu dimaksimalkan hal ini dibuktikan bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir semua pengelolaan keuangan tidak terjadi masalah dan semua berjalan dengan baik” (Wawancara dengan Selfayani, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah berjalan secara sistematis dan transparan. Dalam pelaksanaannya, sekolah menggunakan berbagai dokumen administrasi keuangan seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi dana BOS, buku pembantu pajak, kwitansi pembayaran, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk tertib administrasi keuangan sekolah. Selain itu, sekolah juga menerapkan prinsip transparansi dengan melibatkan komite sekolah dalam proses penyusunan anggaran dan penyampaian laporan penggunaan dana kepada pihak terkait.

Menurut Hasmiati (2025), transparansi pengelolaan dana pendidikan dapat dilihat dari keterbukaan informasi keuangan serta kemudahan akses masyarakat terhadap laporan penggunaan dana sekolah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Lamzah, S.Pd selaku waka kesiswaan SD Negeri 136 Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa pengelolaan dana kegiatan kesiswaan telah dilaksanakan dengan baik dan terkendali. Waka kesiswaan memiliki tanggung jawab dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) khusus program kesiswaan seperti pembinaan OSIS, ekstrakurikuler, dan perlombaan siswa.

Lamzah, S.Pd selaku waka kesiswaan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan :

“Saya sebagai yang merencanakan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) khusus untuk program kerja kesiswaan, seperti pembinaan OSIS, ekstrakurikuler, dan perlombaan, serta mengelola dan menggunakan dana yang dialokasikan khusus untuk kegiatan siswa. Sejauh ini aman dan terkendali dalam melihat kinerja dan juga bagaimana pengelolaan dana dilakukan. Sejauh ini juga kegiatan siswa yang membutuhkan pendanaan alhamdulillah aman dan

amanah, karena perlu diketahui bahwa di sekolah ini rutin melakukan evaluasi dalam pengelolaan”
(Wawancara dengan Lamzah.S.Pd, 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat secara langsung bahwa pengelolaan kegiatan kesiswaan di SD Negeri 136 Kota Palembang berjalan dengan baik dan terorganisasi. Kegiatan pembinaan OSIS, ekstrakurikuler, dan perlombaan siswa dilaksanakan secara aktif dengan dukungan pengelolaan dana yang tertib dan terencana. Selain itu, sekolah juga rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran sehingga seluruh kegiatan siswa dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.



Gambar 1.1 Pelaksanaan pembinaan OSIS, ekstrakurikuler, dan perlombaan, serta Mengelola dan menggunakan dana yang dialokasikan khusus untuk kegiatan siswa berjalan dengan baik dan kompeten.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan pengelolaan keuangan pendidikan secara tertib melalui penyusunan RKAS, pencatatan BKU, laporan dana BOS, serta penyimpanan dokumen pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa penerapan manajemen keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, bendahara, tenaga administrasi, komite sekolah, dan waka kesiswaan. Selain itu, penggunaan dokumen administrasi keuangan seperti RKAS, BKU, laporan dana BOS, dan SPJ

menunjukkan adanya tertib administrasi dalam pengelolaan dana sekolah. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah berjalan secara efektif dan mendukung pelaksanaan program sekolah dengan baik.

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang, ia menyampaikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan di sekolah telah dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan dana, hingga pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan bahwa:

“Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan kebutuhan sekolah serta program prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kemudian tahap pelaksanaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang dilakukan sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan disepakati bersama yang berada di bawah pengawasan kepala sekolah. Setelah dilakukan perencanaan selanjutnya pertanggungjawaban, tentunya semua kegiatan harus dioptimalkan apalagi hal tersebut sangat menguntungkan”
(Wawancara dengan Selfayani, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berada di bawah pengawasan yang baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan optimal.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan keuangan pendidikan dilakukan sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan disepakati bersama. Bendahara sekolah bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dana sekolah serta melakukan pencatatan transaksi keuangan secara tertib melalui Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu pajak, dan dokumen administrasi lainnya. Seluruh penggunaan dana juga disertai bukti transaksi seperti kwitansi dan nota pembayaran sebagai bentuk administrasi yang sah. Menurut Costa (2000), pelaksanaan manajemen keuangan mencakup proses pengaturan arus penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan terkontrol agar penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.

Pelaksanaan keuangan sekolah juga berada di bawah pengawasan kepala sekolah dan dinas pendidikan guna memastikan penggunaan dana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Pengawasan dilakukan melalui monitoring penggunaan anggaran, pemeriksaan administrasi keuangan, serta evaluasi pelaksanaan program sekolah. Menurut Syaifullah (2021), pengawasan merupakan proses pemantauan secara terus-menerus untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan lebih disiplin dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, sekolah juga mulai menerapkan sistem administrasi berbasis digital dalam proses pelaksanaan keuangan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan penyimpanan data keuangan. Penggunaan teknologi dinilai mampu membantu bendahara sekolah dalam mempercepat proses administrasi serta mempermudah pencarian dokumen keuangan. Ariesta (2025) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi keuangan sekolah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data serta mendukung transparansi dalam penyajian laporan keuangan sekolah.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Lamzah, S.Pd selaku waka kesiswaan SD Negeri 136 Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di sekolah telah berjalan dengan baik dan mampu memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk mendukung kelancaran program sekolah.

Lamzah, S.Pd selaku waka kesiswaan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan :

“Pelaksanaannya sudah sangat baik, pengelolaan keuangan di sekolah selalu bisa memprioritaskan hal-hal yang memang perlu diprioritaskan, hal ini tentu sangat menguntungkan” (Wawancara dengan Lamzah.S.Pd, 2026)

Pada tahap pertanggungjawaban, sekolah menyusun laporan penggunaan dana secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran sekolah. Laporan tersebut meliputi laporan realisasi dana BOS, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), BKU, serta dokumen pendukung lainnya yang disampaikan kepada dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya. Menurut Hasmiati (2025), pertanggungjawaban keuangan sekolah merupakan bentuk transparansi lembaga pendidikan dalam menyampaikan penggunaan dana kepada pemerintah dan masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam proses pertanggungjawaban, bendahara sekolah memastikan seluruh bukti transaksi tersusun secara lengkap dan sistematis agar memudahkan proses audit maupun pemeriksaan dari pihak terkait. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara tepat waktu. Transparansi laporan keuangan juga ditunjukkan melalui penyampaian informasi penggunaan dana kepada komite sekolah dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil observasi pada hari Kamis, 09 April 2026 pukul 10.00 WIB, peneliti melihat secara langsung bahwa pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan dan program prioritas sekolah melalui musyawarah bersama kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana dilakukan sesuai RKAS dengan pengawasan kepala sekolah dan dinas pendidikan serta didukung pencatatan administrasi yang tertib melalui BKU, SPJ, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penerapan administrasi berbasis digital turut membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyimpanan data keuangan sekolah.



Gambar 1.2 Tahap perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 136 Kota Palembang.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan pengelolaan keuangan pendidikan secara tertib melalui penyusunan RKAS, pencatatan BKU, penyimpanan SPJ, serta penyusunan laporan penggunaan dana sekolah secara berkala. Dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara dan observasi bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah berjalan sesuai prosedur dan mendukung kelancaran program sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah berjalan secara efektif, sistematis, dan tertib administrasi. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, tenaga administrasi, guru, komite sekolah, serta waka kesiswaan. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan sesuai RKAS dan berada di bawah pengawasan yang baik sehingga penggunaan anggaran dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan sekolah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan teori Mulyasa (2022) yang menyatakan bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan seluruh proses pengelolaan dana pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang, ia menyampaikan bahwa bendahara sekolah memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi dan dokumen keuangan sekolah. Dokumen keuangan yang tersedia di sekolah meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi dana BOS, buku pembantu pajak, bukti transaksi, kwitansi pembayaran, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Seluruh dokumen tersebut disusun dan disimpan sebagai bagian dari administrasi keuangan sekolah yang wajib dipenuhi setiap periode anggaran.

Hasmiati (2025) menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS dapat dilihat dari aksesibilitas dokumen anggaran, keterbukaan informasi keuangan, dan kemudahan masyarakat memperoleh informasi terkait penggunaan dana sekolah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya dituntut

memiliki dokumen keuangan yang lengkap, tetapi juga harus mampu menyediakan akses informasi yang memadai kepada pihak yang membutuhkan.

Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan :

“Menurut tendik yang menangani dalam proses pengelolaan keuangan di sekolah, bendahara memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola administrasi keuangan sekolah. Selain itu, proses pengelolaan keuangan tersebut juga dimonitor dan diawasi oleh kepala sekolah serta Dinas Pendidikan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku” (Wawancara dengan Selfayani, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilakukan secara tertib dengan melibatkan pengawasan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Keberadaan dokumen yang lengkap sangat membantu sekolah dalam proses audit dan pemeriksaan dari dinas pendidikan maupun lembaga pengawas lainnya.

Di SD Negeri 136 Kota Palembang, aksesibilitas dokumen keuangan dapat dilihat dari cara penyimpanan arsip serta sistem administrasi yang digunakan. Menurut E. Mulyasa (2002), administrasi keuangan sekolah yang baik harus didukung oleh sistem dokumentasi yang tertib, lengkap, dan mudah diakses sehingga dapat mempermudah proses pengawasan serta pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan. Dokumen yang tersusun secara sistematis akan mempermudah pencarian data ketika dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa kepala sekolah memiliki peran aktif dalam mengawasi pengelolaan dokumen keuangan sekolah agar seluruh administrasi berjalan secara tertib dan sesuai prosedur.

Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaika:
“Kepala sekolah juga berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dokumen keuangan secara tertib melalui penyusunan laporan, penyimpanan arsip, dan pengawasan penggunaan dana sekolah. Saya juga sebagai penanggung jawab keuangan di sekolah harus bisa aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan keuangan sekolah” (Wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd., 2026)

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat secara langsung bahwa pengelolaan dokumen keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilakukan secara tertib melalui penyusunan laporan, penyimpanan arsip, serta pengawasan penggunaan dana sekolah. Bendahara sekolah terlihat aktif dalam mengelola administrasi keuangan dan menyusun dokumen pendukung seperti RKAS, BKU, laporan dana BOS, serta SPJ. Selain itu, sekolah juga mulai memanfaatkan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas penyimpanan dan pencarian dokumen keuangan.



Gambar 1.3 dalam pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan pengelolaan dokumen keuangan secara tertib melalui penyusunan laporan, penyimpanan arsip, dan pengawasan penggunaan dana sekolah. Dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa sekolah berupaya menjaga ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan agar proses pengelolaan dana dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dikelola dengan cukup baik melalui penyediaan berbagai dokumen administrasi keuangan seperti RKAS, BKU, laporan realisasi dana BOS, buku pembantu pajak, kwitansi pembayaran, dan SPJ. Dokumen-dokumen tersebut disusun dan disimpan secara tertib oleh bendahara sekolah sebagai bentuk administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengelolaan dokumen keuangan juga didukung oleh pengawasan kepala sekolah dan dinas pendidikan agar seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, sekolah mulai menerapkan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas penyimpanan, keamanan, dan kemudahan akses dokumen keuangan. Dengan demikian, pengelolaan dokumen keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi keuangan sekolah.

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyadi selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang, ia menyampaikan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan keuangan sekolah telah dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan laporan keuangan yang rinci dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Informasi keuangan yang disusun oleh sekolah memuat rincian sumber dana, jenis pengeluaran, waktu penggunaan anggaran, serta bukti transaksi yang sah sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat.

Mulyadi selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan:

“Saat ini proses pencairan dana dilakukan secara non-tunai. Apabila pihak sekolah memerlukan dana tunai, maka harus melakukan pencairan melalui bank. Bank yang digunakan oleh sekolah adalah Bank Sumsel Babel di Palembang. Dalam pelaksanaannya, kendala yang sering dihadapi adalah gangguan jaringan, seperti sistem yang lambat atau mengalami bug. Selain itu, proses pelaporan keuangan saat ini juga telah menggunakan sistem digital, di mana seluruh laporan diunggah secara daring” (Wawancara dengan Mulyadi, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa SD Negeri 136 Kota Palembang telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital dan non-tunai sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. Meski masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan sistem daring, sekolah tetap berupaya menjalankan proses pengelolaan keuangan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa penerapan sistem non-tunai memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan sekolah karena dapat mempermudah pelaporan serta meningkatkan efektivitas administrasi keuangan.

Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan :

“Pencairan melalui media non-tunai juga efektif karena ada beberapa manfaat yang dirasakan seperti mempermudah pelaporan (SPJ), menghemat waktu dan biaya, transparan dan akuntabel, serta ketepatan sasaran. Hal ini membuktikan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan keuangan sekolah” (Wawancara dengan Hj. Yusrini., S.Pd., 2026)

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat secara langsung bahwa SD Negeri 136 Kota Palembang telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital dan non-tunai melalui kerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Sistem tersebut digunakan dalam proses pencairan dan pelaporan dana BOS secara elektronik. Selain itu, sekolah juga terlihat melakukan penyusunan laporan keuangan secara tertib melalui dokumen RKAS, BKU, SPJ, dan laporan realisasi penggunaan dana sekolah yang tersimpan dengan baik sebagai bentuk administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.



Gambar 1.4 Bank daerah Sumsel Babel meluncurkan elektronifikasi BOS non-tunai.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah telah mengikuti kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pencairan dan pelaporan dana BOS secara elektronik melalui kerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa penggunaan sistem non-tunai membantu sekolah dalam meningkatkan transparansi, keamanan, serta ketertiban administrasi keuangan. Selain itu, sistem digital juga mempermudah proses penyusunan laporan keuangan sehingga informasi pengelolaan dana dapat disampaikan secara lebih jelas, cepat, dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Kejelasan informasi terlihat dari penyusunan laporan keuangan yang memuat rincian sumber dana, penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan, serta bukti transaksi yang sah sehingga informasi keuangan dapat dipahami dengan baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Sementara itu, kelengkapan informasi didukung oleh tersedianya berbagai dokumen administrasi keuangan seperti RKAS, BKU, laporan realisasi anggaran, kwitansi pembayaran, nota pembelian, dan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah menunjukkan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

yang mendukung terciptanya transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Keterbukaan Proses Pengelolaan Keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lasmi Anita selaku bendahara SD Negeri 136 Kota Palembang, ia menyampaikan bahwa keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah dilakukan melalui evaluasi dan pengawasan secara rutin guna menjaga transparansi dan memastikan seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan informasi dan kejujuran menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan sekolah agar tercipta kepercayaan antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Lasmi Anita selaku Bendahara SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan bahwa: *“Di sekolah, evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan secara rutin untuk menjaga transparansi dan memastikan keabsahan dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Hal tersebut dilakukan karena kepercayaan dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah”* (Wawancara dengan Lasmi Anita, 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa SD Negeri 136 Kota Palembang telah menerapkan prinsip transparansi melalui kegiatan evaluasi dan pengawasan keuangan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh penggunaan dana sekolah dilakukan secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa transparansi pengelolaan keuangan sekolah selalu diprioritaskan melalui evaluasi rutin dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sekolah.

Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan:

“Transparansi memang hal yang juga diprioritaskan dalam proses pengelolaan keuangan. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, saya memaksimalkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka dari itu kami rutin melakukan evaluasi” (Wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd, 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat secara langsung bahwa kegiatan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan tenaga kependidikan. Kegiatan monitoring penggunaan anggaran dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prosedur administrasi dan standar operasional yang berlaku. Selain itu, sekolah juga terlihat aktif dalam menyampaikan informasi penggunaan anggaran sebagai bentuk keterbukaan kepada pihak terkait.



Gambar 1.5 Pelibatan tenaga kependidikan sekolah dalam memahami terlaksananya pengelolaan keuangan sekolah.

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya kegiatan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara rutin di SD Negeri 136 Kota Palembang. Dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa sekolah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan, evaluasi, serta keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa keterbukaan proses pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana sekolah. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan evaluasi secara rutin, serta keterlibatan pihak sekolah dalam proses pengawasan keuangan. Sementara itu, akuntabilitas terlihat dari adanya pertanggungjawaban administratif dan pelaporan penggunaan dana yang dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku. Dengan adanya monitoring, evaluasi, dan keterbukaan informasi, pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu membangun kepercayaan pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

Penerapan Regulasi dalam Menjamin Transparansi Pengelolaan Keuangan

hasil wawancara dengan Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang, ia menyampaikan bahwa penerapan regulasi dalam menjamin transparansi pengelolaan keuangan di sekolah telah dilaksanakan melalui penggunaan sistem digital dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka agar setiap proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selfayani selaku tenaga kependidikan SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan bahwa: *“Jadi di sekolah kami saat ini hampir seluruh sistem telah menggunakan teknologi digital agar proses pengelolaan keuangan tentunya lebih terbuka sesuai standar SOP dan tentunya transparan. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah ARKAS dalam pengelolaan dana BOS. Penggunaan teknologi digital tersebut sangat membantu dalam proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, serta pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien serta memberikan kepercayaan publik tentunya. Namun, kendala yang masih dihadapi adalah masalah sinyal atau jaringan internet yang terkadang kurang stabil”* (Wawancara dengan Selfayani, 2026).

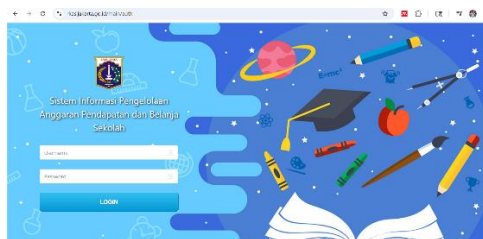
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa SD Negeri 136 Kota Palembang telah menerapkan regulasi transparansi pengelolaan keuangan melalui penggunaan teknologi digital dan sistem administrasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penggunaan aplikasi ARKAS membantu sekolah dalam menjalankan pengelolaan dana BOS secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa sekolah selalu berupaya memaksimalkan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan dana sekolah.

Hj. Yusrini, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 136 Kota Palembang menyampaikan:

“Sebagaimana undang-undang yang berlaku tentang keterbukaan dan transparansi, sekolah selalu memaksimalkan hal-hal yang transparan dalam pencatatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan setiap tahapan siklus anggaran dapat diakses, dipantau, dan dipertanggungjawabkan kepada publik” (Wawancara dengan Hj. Yusrini, S.Pd, 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat secara langsung bahwa SD Negeri 136 Kota Palembang telah memanfaatkan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan dana BOS dan administrasi keuangan sekolah. Penggunaan sistem digital tersebut mempermudah proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan secara lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, sekolah juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi pemerintah dan standar operasional prosedur yang berlaku.



Gambar 1.2 Website pengelolaan aplikasi ARKAS di sekolah.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital melalui penggunaan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan dana BOS. Dokumentasi tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa penggunaan teknologi informasi membantu sekolah dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Sistem digital tersebut juga mempermudah monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran oleh pihak sekolah maupun dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi dalam menjamin transparansi pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Sekolah menerapkan pengelolaan keuangan yang terbuka, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab dengan mengacu pada regulasi pemerintah tentang keuangan negara dan keterbukaan informasi publik. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang tertib, pelaksanaan evaluasi secara rutin, serta keterbukaan informasi penggunaan dana sekolah kepada pihak terkait dan masyarakat. Selain itu, penggunaan aplikasi ARKAS membantu proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, akurat, dan transparan.

Dengan demikian, penerapan regulasi transparansi pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang dapat dikatakan telah berjalan dengan baik melalui dukungan sistem digital, pengawasan yang terstruktur, serta komitmen sekolah dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan.

Discussion

Manajemen Keuangan Pendidikan

Pengelolaan keuangan pendidikan telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah agar penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dan ketentuan dana BOS. Menurut *Jurnal Inovasi Penelitian* (2021), perencanaan anggaran pendidikan merupakan proses penyusunan program dan pengalokasian biaya yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam tahap pelaksanaan, bendahara sekolah melakukan pengelolaan dan pencatatan keuangan melalui Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu pajak, kwitansi, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk tertib administrasi keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi penggunaan dana, keterlibatan komite sekolah, serta penyusunan laporan realisasi dana BOS secara berkala. Menurut Dana (2025), digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah melalui aplikasi ARKAS dapat meningkatkan transparansi, efektivitas pencatatan, serta keterbukaan informasi anggaran kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara, tenaga kependidikan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan sekolah selama dua tahun terakhir berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti karena adanya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sekolah memiliki dokumen administrasi keuangan yang lengkap seperti RKAS, BKU, laporan realisasi dana BOS, dan SPJ. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan sebagian arsip yang masih disimpan secara manual. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung tata kelola sekolah yang efektif dan efisien.

Strategi Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan yang Transparan

Strategi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya berkaitan dengan proses penerimaan dan penggunaan dana, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri 136 Kota Palembang, pengelolaan keuangan sekolah telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS melalui penyediaan dokumen administrasi keuangan yang lengkap, keterbukaan informasi kepada pihak terkait, serta

penggunaan sistem digital dalam proses administrasi keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Pranata (2023) yang menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dapat dilihat melalui ketersediaan dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses pengelolaan, dan adanya regulasi yang menjamin keterbukaan informasi.

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan. Berdasarkan hasil penelitian, SD Negeri 136 Kota Palembang telah memiliki berbagai dokumen administrasi keuangan seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi dana BOS, buku pembantu pajak, bukti transaksi, kwitansi pembayaran, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dokumen-dokumen tersebut disimpan dan dikelola oleh bendahara sekolah sebagai bentuk administrasi keuangan yang wajib dipenuhi setiap periode anggaran. Keberadaan dokumen yang lengkap mempermudah sekolah dalam proses audit, pengawasan, dan pemeriksaan dari dinas pendidikan maupun lembaga pengawas lainnya. Menurut E. Mulyasa (2002) administrasi keuangan sekolah yang baik harus didukung oleh sistem dokumentasi yang tertib, lengkap, dan mudah diakses agar dapat mempermudah proses pengawasan serta pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan. Selain itu, F. Hidayat & Tolla (2022) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS dapat dilihat dari aksesibilitas dokumen anggaran, keterbukaan informasi keuangan, dan kemudahan masyarakat memperoleh informasi terkait penggunaan dana sekolah. Dengan demikian, kelengkapan dokumen keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Dalam mendukung efektivitas administrasi keuangan, SD Negeri 136 Kota Palembang juga telah memanfaatkan teknologi digital melalui penggunaan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan dana BOS. Penggunaan sistem digital tersebut membantu sekolah dalam proses pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, serta pelaporan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Pamungkas (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi keuangan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah melalui dokumentasi yang terintegrasi dan aksesibilitas data yang lebih luas. Selain itu, M. S. Nugraha (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi keuangan dapat meningkatkan efektivitas penyimpanan data, mempercepat pencarian dokumen, serta meminimalkan risiko kehilangan arsip. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan sekolah juga sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0 yang menuntut lembaga pendidikan untuk menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. S. H. Nugraha (2025) menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi komputer dan sistem informasi manajemen keuangan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan sekolah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah masih menghadapi beberapa kendala teknis, terutama terkait gangguan jaringan internet, sistem pelaporan daring yang terkadang mengalami bug, serta keterbatasan infrastruktur digital. Kendala tersebut memengaruhi proses pelaporan keuangan secara online dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan administrasi berbasis digital.

Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan keuangan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian, laporan penggunaan dana BOS di SD Negeri 136 Kota Palembang disusun secara sistematis dan memuat rincian sumber dana, jenis pengeluaran, penggunaan anggaran, serta bukti transaksi yang sah. Informasi tersebut disampaikan kepada pihak terkait seperti guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekolah. Adzkia (2024) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sekolah dapat tercapai apabila seluruh pengeluaran didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan sesuai prosedur. Selain itu, Hanafi & Halim (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tindakan dan kinerja yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan lengkap, sekolah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Keterbukaan proses pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang juga terlihat dari adanya keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran sekolah. Penyusunan RKAS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah agar penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Ardianto (2012) menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan secara menyeluruh dan memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan secara eksternal oleh dinas pendidikan agar penggunaan dana tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku Kurniawan (2023) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus guna menjamin terlaksananya perencanaan secara konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut, sekolah dapat memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

Dalam aspek akuntabilitas, SD Negeri 136 Kota Palembang juga telah melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan secara rutin untuk menjaga transparansi dan memastikan keabsahan setiap proses pengelolaan anggaran sekolah. Mardiasmo (2002b) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Evaluasi rutin yang dilakukan sekolah menjadi bentuk pengendalian sekaligus upaya perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan keuangan. Selain itu, sekolah juga menerapkan sistem pencairan dana BOS secara non-tunai melalui kerja sama dengan Bank Sumsel Babel sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah. Penerapan sistem non-tunai tersebut mendukung peningkatan transparansi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Penerapan regulasi dalam pengelolaan keuangan sekolah juga menjadi faktor penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan di SD

Negeri 136 Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah, standar operasional prosedur (SOP), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab (INDONESIA, 2003). Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran public (Indonesia, 2008). Firmansyah (2017) juga menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi unsur utama dalam mewujudkan *good governance*. Dengan adanya regulasi yang jelas, sekolah memiliki pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan keuangan di SD Negeri 136 Kota Palembang telah berjalan dengan baik dan mampu mencerminkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Transparansi tersebut terlihat dari kelengkapan dokumen administrasi keuangan, keterbukaan informasi penggunaan anggaran, keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan keuangan, penerapan regulasi yang sesuai, serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi ARKAS. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan sistem pelaporan daring, sekolah tetap berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan di SD Negeri 136 Kota Palembang dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan keuangan sekolah yang sistematis, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku. Proses manajemen keuangan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, tenaga administrasi, guru, serta komite sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang baik dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang efektif dan efisien.

Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan kebutuhan dan program prioritas sekolah melalui musyawarah bersama. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam penggunaan dana pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, pengembangan sarana prasarana, serta kegiatan peserta didik. Dalam tahap pelaksanaan, seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai RKAS dan didukung dengan administrasi keuangan yang tertib melalui penggunaan dokumen seperti Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi dana BOS, kwitansi pembayaran, buku pembantu pajak, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Selain itu, SD Negeri 136 Kota Palembang juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi penggunaan dana kepada pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala dan sesuai prosedur yang berlaku. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara rutin oleh kepala sekolah, bendahara, dan dinas pendidikan guna memastikan penggunaan dana berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta terhindar dari penyalahgunaan anggaran.

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan sekolah juga telah dikelola dengan baik melalui penyimpanan arsip administrasi secara tertib dan sistematis. Sekolah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, seperti penggunaan aplikasi ARKAS dan sistem pelaporan berbasis daring untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan. Digitalisasi tersebut memberikan manfaat besar dalam mendukung keterbukaan informasi, mempermudah proses monitoring, serta meningkatkan kualitas administrasi keuangan sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan sistem digital, namun sekolah terus berupaya mengatasinya melalui evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Penerapan regulasi terkait transparansi pengelolaan keuangan juga telah dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip good governance dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sekolah berupaya memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana dapat dipantau, diakses, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pendidikan di SD Negeri 136 Kota Palembang dapat dikatakan telah berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkia, R., Anastasya, F., Awalliyah, N. S., & Kusumaningrum, H. (2024). Manajemen keuangan sekolah: transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. *Al-Gafari: Manajemen Dan Pendidikan*, 2(3), 278–289.
- Ardianto, E. (2012). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dana, P., Rusmiyati, L., Abdullah, R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). *Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital : Kajian Literatur terhadap Efektivitas , Transparansi , dan Akuntabilitas*. 3(4), 5372–5380.
- Firmansyah, Y. (2017). Penerapan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1).
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). Analisis laporan keuangan. *Yogyakarta: Upp Stim Ykpn*.
- Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (bos). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 3(1), 66.
- Hidayat, R. (2022). Pentingnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Sekolah. *Teknologi Pendidikan. Universitas Negeri Padang*.
- Hj. Yusrini., S.Pd., M. S. (2026). *wawancara kepala sekolah SD Negeri 136 kota palembang*.
- INDONESIA, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Lembaran N. Jakarta: Sekretariat Negara RI*.
- Indonesia, U.-U. R. (2008). Keterbukaan Informasi Publik. *UU RI, 1. Jurnal Inovasi Penelitian*. (2021). 1(9).
- Keuangan, B. P. (2023). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022. *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Kurniawan, M. A. (2023). BAB 5 Manajemen keuangan pendidikan: Mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis*, 123.

- Lamzah, S. Pd, I. (2026). *wawancara waka kesiswaan*.
- Lasmi Anita, S. P. (2026). *wawancara bendahara sekolah SD Negeri 136*.
- Maleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. *IntakoTanggulangi Dan Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo*.
- Mardiasmo. (2002a). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo, D. (2002b). *Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Moleong, J. (2013). *Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S. P. (2026). *wawancaratendik SD Negeri 136 kota Palembang*.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen berbasis sekolah* (Vol. 90). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi aksara.
- Nugraha, M. S., Andriani, N., Hilman, C., Nasir, M., Firdaus, F., Amiruddin, M. F., Riasah, E. S., Hasan, F. N., Nurachadijat, K., & Azmi, U. (2025). *Manajemen Perguruan Tinggi*. Mega Press Nusantara.
- Nugraha, S. H., Sholeh, M., Roesminingsih, E., Amalia, K., & Khamidi, A. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Keuangan Sekolah: Sebuah Kajian Literatur. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 6732–6741.
- Nurkhasyanah, A., Rahayu, S. S., Verawati, H., Reba, Y. A., Nuriah, Y., Noveny, R. M., Th, S., NNLP, C., Firmansyah, M., & Kom, S. (2025). *Strategi pengelolaan pendidikan*. CV Rey Media Grafika.
- Pamungkas, D. P. A. (2025). *Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E-Katalog Perda Kabupaten Purworejo*. Universitas Islam Indonesia.
- Pranata, Y., Ilhamiwati, M., & Arli Silvia, S. (2023). *Akuntabilitas dan Transparansi BUMDes pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Purwanti, T. (2022). *Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara)*. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 133–142.
- Qomar, M. (2016). *Manajemen pendidikan islam*.
- Ramadani, N., Karim, A. N., Triyaningsih, W., Rahman, A., Suhadi, A., Fatimah, S., & Trisnawati, O. R. (2025). Penggunaan Model QODE Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di SD N 2 Bumirejo Kebumen. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 8(3), 1423–1431.
- Selfayani, S. P. (2026). *wawancara bersama tendik di SD Negeri 136 Palembang*.
- Selianawati, F., Ulfah, I. F., & Wijayanti, I. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Ponorogo. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1352–1363.
- Suyati, S., Wandira, A., Hasanudin, I., Hikmatiah, W., & Tania, N. (2025). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat melalui Optimalisasi Dana BOS Kinerja di Kabupaten Buton Tengah. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1497–1504.
- Widyani, I. P., Luluk, H., & Widuroyekti, B. (2025). Website Duwetku: Sebagai Upaya Akuntabilitas Dana Pendidikan pada LP Maarif RA Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(2), 173–192.